

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang memungkinkan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau yang memiliki bakat dan kecerdasan luar biasa, untuk belajar secara bersamaan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya.¹ Inklusi merupakan pendekatan yang berfokus untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan menerima semua individu, terlepas dari perbedaan karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, atau latar belakang lainnya. Pola pikir inklusif ini selanjutnya diimplementasikan dalam sistem pendidikan dengan mengintegrasikan konsep inklusi ke dalam kurikulum, sehingga pendidikan inklusif berfungsi sebagai layanan yang memberikan peluang yang sama bagi semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.²

Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang inklusi, berbagai kebijakan pemerintah telah diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Kebijakan mengenai pendidikan inklusif di Indonesia berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan

¹ Ditjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "Infografis : Pendidikan Inklusif," ditpsd.kemdikbud.go.id, 7 April 2021, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/36.73.255.91/artikel/detail/infografis-pendidikan-inklusif>.

² Farah Arriani dkk., *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), hal. 4.

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara, demi mencapai keadilan dan kesetaraan. Sebagai langkah untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan mengenai sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan khusus ditujukan untuk siswa dengan keterbatasan fisik, masalah emosional, gangguan mental, kesulitan intelektual, atau tantangan sosial. Selain itu, Pasal 10 dalam undang-undang mengenai penyandang disabilitas menegaskan bahwa peserta didik dengan kebutuhan khusus berhak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.³

Prinsip utama dalam penerapan pendidikan inklusif adalah menjamin bahwa setiap siswa, tanpa pengecualian, mendapatkan kesempatan untuk belajar, dengan memanfaatkan perbedaan sebagai sumber daya untuk mengoptimalkan potensi mereka. Prinsip penting lainnya adalah keberadaan siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas, yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dan diterima dalam komunitas sekolah. Dalam implementasi pendidikan inklusif, kurikulum dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Sekolah diwajibkan untuk mempertimbangkan tiga aspek dalam proses penyesuaian ini, yaitu kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar.⁴

³ Arriani dkk., Hal. 3.

⁴ Arriani dkk., Hal. 4.

Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Sistem Pendidikan Nasional, anak dengan kebutuhan khusus diidentifikasi sebagai: (1) anak yang mengalami masalah pada aspek fisik, emosi, mental, kecerdasan, atau interaksi sosial; (2) anak yang memiliki kemampuan dan bakat yang sangat tinggi; serta (3) anak yang berasal dari daerah terpencil atau tertinggal, termasuk mereka yang berasal dari masyarakat adat yang tinggal di wilayah terpencil. Setiap anak dalam kategori tersebut berhak menerima layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.⁵

Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 1,6 juta Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia, namun hanya sebagian kecil yang mendapatkan akses pendidikan inklusi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi pendidikan inklusi, terutama terkait dengan kesiapan sekolah dan kompetensi guru. Implementasi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dimulai dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan afirmasi dalam seleksi masuk di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Afirmasi ini diberikan berdasarkan kondisi peserta didik yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.⁶

⁵ Arriani dkk., Hal. 6.

⁶ Fieka Nurul Arifa, "Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif," *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* 16 (Februari 2024).

Awal mula berdirinya sekolah inklusi di Kota Kediri dimulai pada tahun 2011 ketika Dinas Pendidikan Kota Kediri meresmikan SMP YBPK Kediri sebagai salah satu sekolah inklusi pertama di daerah tersebut. Sebelumnya, pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) umumnya disediakan di Sekolah Luar Biasa (SLB), yang memisahkan mereka dari siswa reguler. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif, SMP YBPK mulai menerima siswa berkebutuhan khusus dan mengintegrasikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam proses pembelajaran bersama siswa lainnya. Bersama dengan SMP YBPK, beberapa sekolah menengah pertama lainnya di Kota Kediri juga ditetapkan sebagai sekolah inklusi, termasuk SMP Negeri 1, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 8. Pada tahun 2022, SMP Negeri 9 juga ditambahkan sebagai sekolah inklusi baru di Kota Kediri.⁷ Di antara sekolah tersebut, SMP Muhammadiyah 2 Kediri juga berperan aktif dalam menerapkan pendidikan inklusi yang terlibat dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kota Kediri dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang membahas berbagai tantangan dan strategi dalam implementasi pendidikan inklusi.⁸

SMP Muhammadiyah 2 Kediri merupakan sekolah yang memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah inklusi lainnya. . Berikut data terbaru dari Kementerian Pendidikan dan

⁷ Pemerintahan Kota Kediri, "Tambah Sekolah Inklusi, Wali Kota Kediri Letakkan Batu Pertama Pembangunan SMPN 9," Juli 2022, <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/15253/tambah-sekolah-inklusi-wali-kota-kediri-letakkan-batu-pertama-pembangunan-smpn-9>.

⁸ Akbar Hidayat, "Puisi Indah GPK SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri," *PWMU.co*, September 2024, <https://pwmu.co/378047/09/13/puisi-indah-gpk-smp-muhammadiyah-2-kota-kediri/>.

Kebudayaan mengenai jumlah SMP sekolah inklusi dengan jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di kota Kediri:

Tabel 1.1 : Jumlah Sekolah dan Siswa Inklusi di Kota Kediri

Nama Sekolah	Jumlah siswa Inklusi
SMP Muhammadiyah 2 Kediri	15
SMP Negeri 4 Kota Kediri	4
SMP Negeri 5 Kota Kediri	4
SMP Negeri 8 Kota Kediri	8
SMP Islam Terpadu Bina Insani	4

Dari data tersebut SMP Muhammadiyah 2 mencatatkan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang cukup signifikan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Muhammadiyah 2 Kediri adalah 15 siswa. Data ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menyediakan pendidikan inklusi yang memadai bagi siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Sekolah ini telah berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang bersama dengan teman-teman sebaya mereka. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 2 Kediri melayani berbagai jenis kebutuhan khusus, seperti tunanetra, tuna rungu, dan disabilitas lainnya. Sekolah ini juga memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), termasuk ruang konseling dan aksesibilitas yang memadai.⁹

⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus," Maret 2025,

SMP Muhammadiyah 2 Kediri adalah institusi pendidikan yang mengintegrasikan siswa reguler dan siswa dengan kebutuhan khusus atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam satu sistem pembelajaran yang sama. Guru di SMP Muhammadiyah 2 Kediri menghadapi situasi yang menantang, mereka tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa reguler, tetapi juga siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian khusus dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Hal ini menciptakan tambahan dalam proses pengajaran, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif guru dalam mengelola kelas. Salah satu keunikan yang membedakan SMP Muhammadiyah 2 Kediri dengan sekolah lain adalah keberadaan guru pendamping khusus (GPK) yang tidak hanya mendampingi ABK di kelas, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan komunitas disabilitas. Salah satu GPK di sekolah ini bahkan menjabat sebagai Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) di Kota Kediri, yang menunjukkan komitmen sekolah dalam mendukung inklusi dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus secara lebih luas. Dengan sistem pembelajaran inklusif tersebut, SMP Muhammadiyah 2 Kediri berupaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah, menghargai keunikan setiap siswa, serta mendorong interaksi sosial tanpa diskriminasi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal fasilitas dan pelatihan guru.

Di sekolah inklusi, terdapat beberapa kelompok guru yang berperan penting dalam mendukung pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Kelompok utama ini meliputi Guru Pendamping Khusus (GPK), guru kelas

https://referensi.data.kemdikbud.go.id/berkebutuhan_khusus/asesmen/wilayah/056302/3?jenjang=dikdas&kelas=semua.

reguler, dan guru mata pelajaran.¹⁰ Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dalam mengelola proses belajar-mengajar serta mendampingi perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus secara umum, salah satunya adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK), yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan inklusif.

Berdasarkan pedoman mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, Guru Pendamping Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kualifikasi dalam pendidikan khusus atau Pendidikan Luar Biasa, atau guru yang telah mengikuti pelatihan terkait pendidikan khusus, yang kemudian ditempatkan di sekolah inklusif.¹¹ Guru Pendamping Khusus (GPK) memiliki kompetensi khusus dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus. Mereka bertugas untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membantu guru kelas dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa.¹² Menurut penelitian terbaru, hanya sekitar 14,8% dari 40.164 sekolah inklusi di Indonesia yang memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK), menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam jumlah tenaga pendidik yang terlatih untuk mendukung pendidikan inklusif.¹³

¹⁰ Arifa, "Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif," Hal. 4.

¹¹ Haniifah Hanaa dan Efendi Mia Evani, "Peran Penting Guru Pembimbing Khusus Dalam Pendidikan Inklusi Di SDI Al-Muttaqin," *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian* 8, no. 3 (30 September 2022): Hal. 168. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v8n3.p167-171>.

¹² Yuni Rahmawati dkk., "Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru Pembimbing Khusus Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SD Ibnu Sina," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 2 (28 April 2023): Hal. 418, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.562>.

¹³ Siti Nurhadipa dkk., "Tantangan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 1 (4 Januari 2024): Hal. 162, <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2384>.

Terkait hal tersebut, keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan juga *Shadow Teacher* (Guru Bayangan) sangat penting dalam sekolah inklusi. Guru Pendamping Khusus (GPK) berperan sebagai salah satu elemen kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Tanpa adanya Guru Pendamping Khusus (GPK), pelaksanaan Program Pembelajaran Individual (PPI) tidak dapat berjalan dengan baik. Akibatnya, layanan pembelajaran di sekolah inklusi tidak dapat dioptimalkan.

Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 171, Guru Pendamping Khusus (GPK) adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas memberikan bimbingan, pengajaran, penilaian, dan evaluasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai jenis sekolah, baik itu sekolah umum, kejuruan, maupun keagamaan. Dalam praktiknya, Guru Pendamping Khusus (GPK) mendampingi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) selama kegiatan belajar di kelas reguler. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah tidak semua Guru Pendamping Khusus (GPK) memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung kebutuhan belajar siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Lemahnya kompetensi ini dapat memperburuk proses pembelajaran, menyebabkan siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merasa tertekan dan tidak mau belajar di kelas.¹⁴

Guru Pendamping Khusus (GPK) idealnya memiliki latar belakang pendidikan luar biasa untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dalam

¹⁴ Gerry Olvina Faz dan Istiqamah Hafid, "Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah Inklusi Palangka Raya: Shadow Teacher of Inclusive School in Palangka Raya," *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 8, no. 2 (26 Juni 2023): Hal. 48-49., <https://doi.org/10.33084/tunas.v8i2.5148>.

mendukung anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, pada kenyataannya, banyak sekolah inklusi di Indonesia yang tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan latar belakang pendidikan luar biasa mengakibatkan program layanan pendidikan inklusi tidak dapat mencapai potensi terbaiknya.¹⁵ Dalam observasi awal yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 2 Kediri, peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan pendidikan inklusi. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan luar biasa (PLB) dan lebih umum berasal dari jurusan bimbingan konseling (BK). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Guru Pendamping Khusus (GPK), khususnya dalam menangani siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki kebutuhan khusus dalam aspek sosial dan perilaku.

Subjective well-being dari Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, karena kondisi kesejahteraan ini dapat memengaruhi motivasi dan semangat mereka dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Menurut Diener, *subjective well-being* mencakup tiga komponen utama, yaitu kepuasan hidup, frekuensi emosi positif, dan minimisasi emosi negatif.¹⁶ Dalam konteks sekolah inklusi, *subjective well-being* guru memainkan peran penting karena guru yang memiliki kesejahteraan yang baik cenderung lebih termotivasi dalam

¹⁵ Yuda Yuliyanto dan Sedarmayanti, "Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Situbondo.," *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 1, no. 2 (12 November 2023): Hal. 174, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7294>.

¹⁶ Ed Diener, "*Subjective well-being*," *Psychological Bulletin* 95, no. 3 (1984): 542–75, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542>.

mendampingi siswa. Sebaliknya, ketika guru merasa kurang puas atau terbebani secara emosional, mereka rentan mengalami stres yang berkepanjangan, yang dapat memengaruhi kualitas pengajaran dan perhatian yang diberikan kepada siswa, terutama siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang membutuhkan pendekatan khusus.¹⁷

Subjective well-being adalah bagaimana individu mengevaluasi hidup mereka, termasuk komponen afektif seperti emosi positif dan negatif atau kestabilan emosi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Damanik, menunjukkan bahwa guru pendamping di sekolah inklusi dapat mengalami tingkat *subjective well-being* yang bervariasi, dengan beberapa merasa puas dan lainnya tidak. Penelitian menunjukkan bahwa guru di sekolah inklusi mengalami peningkatan beban kerja dan stres, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan subjektif mereka. Guru-guru mengungkapkan bahwa beban kerja mereka bertambah setelah sekolah menjadi inklusi, termasuk melakukan asesmen dan menyiapkan materi pembelajaran yang berbeda untuk siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus.¹⁸

Hasil wawancara dengan salah satu Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri, subjek berinisial U mengungkapkan bahwa ia merasa cukup puas dengan pekerjaannya, terutama ketika melihat kemajuan siswa yang ia dampingi. Ia menyatakan, "Momen ketika mereka berhasil memahami pelajaran adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya." Selain

¹⁷ Rahma Uluwiyya, Aat Sriati, dan Kosim Kosim, "Gambaran Tingkat Stress Kerja Guru di Sekolah Inklusi," *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 17, no. 1 (19 Desember 2024): Hal. 25, <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v17i1.2683>.

¹⁸ Risna Hayati dan Ananda Camelia Teafora Damanik, "Subjective Well Being pada Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme) di Pontianak," *Eksistensi* 2, no. 1 (2021): Hal. 5, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6562270517227724422&hl=en&oi=scholar>.

itu, ia juga merasakan emosi positif setiap kali melihat senyuman siswa ketika mereka berhasil, yang membuatnya merasa bahagia dan termotivasi untuk terus mendampingi mereka. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan, "Ada kalanya saya merasa stres, terutama ketika harus menangani banyak siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Terkadang, saya merasa kewalahan dan butuh dukungan lebih dari rekan-rekan."¹⁹

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *subjective well-being* Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi, khususnya dalam hal kepuasan hidup, emosi positif, dan emosi negatif, serta pengaruhnya terhadap kemampuan adaptasi dan kualitas pembelajaran yang mereka berikan di lingkungan sekolah inklusi. Dengan memahami kondisi kesejahteraan subjektif Guru Pendamping Khusus (GPK), diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah inklusi. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif serta mendukung kesejahteraan para pendidik, sehingga dapat menjalankan peran dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi siswa berkebutuhan khusus.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian, penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan berikut:

¹⁹ Subjek U, Wawancara, 11 November 2024.

1. Bagaimana Guru Pendamping Khusus (GPK) menghayati dan memahami *Subjective well-being* dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK)?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi *Subjective well-being* Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami bagaimana Guru Pendamping Khusus (GPK) menghayati dan memahami konsep *Subjective Well-being* dalam proses pendampingan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *Subjective well-being* Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMP Muhammadiyah 2 Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi pendidikan dan pendidikan inklusif. Dengan menganalisis kesejahteraan subjektif guru, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengajaran di sekolah inklusi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru Sekolah Inklusi:

Memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan subjektif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di kelas inklusi. Dengan meningkatkan kesejahteraan subjektif guru, diharapkan kualitas pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus juga akan meningkat.

b. Bagi Sekolah:

Menjadi masukan dalam merancang kebijakan atau program pendukung untuk membantu guru menghadapi tantangan dalam mengelola kelas inklusi. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak SMP Muhammadiyah 2 Kediri untuk merancang program pelatihan dan dukungan yang lebih baik bagi guru, guna meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka.

c. Bagi Peneliti Lain:

Bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) dalam konteks pendidikan inklusif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama, yaitu kesejahteraan guru dan pengaruhnya terhadap siswa berkebutuhan khusus.

E. Definisi Konsep

1. *Subjective well-being*

Subjective well-being, adalah evaluasi subjektif individu terhadap kesejahteraannya berdasarkan persepsi tentang kehidupannya. *Subjective*

well-being meliputi kepuasan terhadap kehidupan serta pengalaman emosi yang positif maupun negatif.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang memungkinkan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau yang memiliki bakat dan kecerdasan luar biasa, untuk belajar secara bersamaan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya.

3. Guru Pendamping Khusus (GPK)

Guru Pendamping Khusus (GPK) adalah seorang pendidik yang memiliki kualifikasi dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, atau yang telah mengikuti pelatihan di bidang tersebut, dan ditugaskan di sekolah inklusif.

4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Sistem Pendidikan Nasional, anak dengan kebutuhan khusus diidentifikasi sebagai: (1) anak yang mengalami masalah pada aspek fisik, emosi, mental, kecerdasan, atau interaksi sosial; (2) anak yang memiliki kemampuan dan bakat yang sangat tinggi; serta (3) anak yang berasal dari daerah terpencil atau tertinggal, termasuk mereka yang berasal dari masyarakat adat yang tinggal di wilayah terpencil. Setiap anak dalam kategori tersebut berhak menerima layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Idhartono, A. R., & Hidayati, N. yang berjudul "Dinamika *Subjective well-being* dan Resiliensi Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi," yang dipublikasikan dalam *Didaktika: Jurnal Kependidikan*. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kesejahteraan subjektif orang tua anak berkebutuhan khusus dan resiliensi mereka dalam menghadapi tantangan di sekolah inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi cenderung lebih resilien dalam mendukung pendidikan anak mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan emosional dan sosial bagi orang tua, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pengalaman mereka dalam lingkungan pendidikan inklusif.²⁰

Penelitian saya dan Idhartono memiliki kesamaan dalam mengeksplorasi *subjective well-being* dalam konteks pendidikan inklusif serta berupaya memahami pengaruhnya terhadap pengalaman di lingkungan tersebut. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus subjek penelitian. Penelitian saya menyoroti *subjective well-being* guru pendamping khusus (GPK), sementara penelitian Idhartono lebih berfokus pada kesejahteraan orang tua anak berkebutuhan khusus.

2. Penelitian oleh Afifah, N., & Nasution, F. yang berjudul "Peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri

²⁰ Amelia Rizki Idhartono dan Nurul Hidayati, "Dinamika *Subjective Well-Being* Dan Resiliensi Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 1 (1 Februari 2024): 417–26, <https://doi.org/10.58230/27454312.414>.

dan Kesejahteraan (*Well Being*) Siswa." Penelitian ini mengeksplorasi peran Guru Bimbingan dan Konseling (GBK) dalam mengembangkan kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru Bimbingan Konseling (GBK) memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui intervensi counseling yang efektif.²¹

Persamaan antara penelitian saya dengan penelitian Afifah dan Nasution terletak pada fokus terhadap kesejahteraan individu dalam pendidikan inklusif serta peran masing-masing individu dalam memengaruhi kesejahteraan di lingkungan tersebut. Namun, penelitian saya berfokus pada *subjective well-being* guru pendamping khusus (GPK), sedangkan penelitian Afifah dan Nasution menyoroti siswa serta peran guru BK dalam mendukung mereka.

3. Penelitian oleh Amalia, N., & Kurniawati, F. yang berjudul "Studi Literatur: Peran Guru Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi." Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis literatur untuk mengidentifikasi peran guru pendidikan khusus dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus memiliki tanggung jawab penting dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individual siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Penelitian ini juga menekankan perlunya pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru

²¹ Nada Afifah dan Fauziah Nasution, "Peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri dan Kesejahteraan (Well Being) Siswa," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (25 Mei 2023): 368–80, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.458>.

pendidikan khusus agar mereka dapat menjalankan peran mereka secara efektif, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif.²²

Persamaan penelitian Amalia dan Kurniawati dengan penelitian saya terletak pada fokus peran guru dalam pendidikan inklusif, pentingnya dukungan dan pelatihan, serta tantangan yang dihadapi pendidik. Namun, penelitian saya lebih spesifik membahas *subjective well-being* guru pendamping khusus (GPK) di SMP Muhammadiyah 2 Kediri, sementara penelitian Amalia dan Kurniawati lebih umum membahas peran guru pendidikan khusus tanpa menekankan kesejahteraan subjektif mereka.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ertürk berjudul "*The Relationship between School Administrators' Supportive Behaviors and Teachers' Job Satisfaction and Subjective well-being*" menemukan bahwa perilaku suportif dari administrator sekolah berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan subjektif guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pimpinan sekolah, seperti pengakuan dan penyediaan sumber daya, dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan kesejahteraan emosional guru, yang pada gilirannya berdampak positif pada motivasi mereka dalam mengajar.²³

²² Nissa Amalia dan Farida Kurniawati, "Studi Literatur: Peran Guru Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi," *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, no. 2 (7 Juni 2021): 361, <https://doi.org/10.33394/jk.v7i2.3730>.

²³ Ramazan Ertürk, "The Relationship between School Administrators' Supportive Behaviors and Teachers' Job Satisfaction and *Subjective well-being*," *International Journal of Contemporary Educational Research* 8, no. 4 (30 Oktober 2022): 184–95, <https://doi.org/10.33200/ijcer.956667>.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus terhadap *subjective well-being* guru sebagai indikator kualitas pendidikan serta pentingnya dukungan dari administrator atau rekan kerja. Namun, penelitian Ertürk membahas sekolah umum, sementara penelitian saya lebih spesifik pada tantangan guru di sekolah inklusi, termasuk pengelolaan siswa berkebutuhan khusus dan beban kerja tambahan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar berjudul "*Influence of University Teachers' Job Satisfaction on Subjective well-being and Job Performance*" menemukan bahwa kepuasan kerja dosen berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan subjektif dan kinerja kerja mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen yang merasa puas dengan pekerjaan mereka cenderung memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan kinerja akademik dan profesional.²⁴

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus terhadap *subjective well-being* sebagai indikator kualitas pekerjaan serta peran kepuasan kerja dalam meningkatkan kesejahteraan individu.. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks dan subjek penelitian. Kumar berfokus pada dosen universitas, sedangkan penelitian saya meneliti guru pendamping khusus (GPK) di sekolah inklusi.

6. Penelitian oleh Al Amelia, Pratikto, dan Nainggolan yang berjudul "*Dukungan Sosial dan Subjective well-being pada Mahasiswa Rantau*" mengkaji hubungan antara dukungan sosial dan *subjective well-being* di

²⁴ Associate Professor, School of Management National Institute of Technology Karnataka (NITK), Surathkal dan Dr S Pavan Kumar, "Influence of University Teachers' Job Satisfaction on *Subjective well-being* and Job Performance," *Journal of Engineering Education Transformations* 35, no. S1 (1 Januari 2022): 160–67, <https://doi.org/10.16920/jeet/2022/v35is1/22023>.

kalangan mahasiswa yang belajar jauh dari rumah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 102 mahasiswa rantau di Universitas 17 Agustus Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dan *subjective well-being*, di mana semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan subjektif yang dirasakan oleh mahasiswa.²⁵

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu *subjective well-being*. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al Amelia et al. menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada populasi penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada guru pendamping khusus (GPK) dalam konteks pendidikan inklusi, sementara penelitian Al Amelia et al. meneliti tantangan adaptasi mahasiswa rantau di perguruan tinggi.

7. Penelitian oleh Taslim dan Dabi yang berjudul “Perbedaan *Subjective well-being* pada Guru Sekolah Luar Biasa Berstatus Honorer dan Pegawai Negeri Sipil di Ternate”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif guru, dengan hasil menunjukkan bahwa guru PNS memiliki tingkat *subjective well-being* yang lebih tinggi dibandingkan guru honorer. Faktor-faktor

²⁵ Susi Dewi Al Amelia, Eben Ezer Nainggolan, dan Herlan Pratikto, “Dukungan sosial dan *subjective well-being* pada mahasiswa rantau,” *Journal of Psychological Research* 2, no. 1 (2022).

seperti gaji, status kepegawaian, dan latar belakang pendidikan dianggap memengaruhi kesejahteraan subjektif mereka.²⁶

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus terhadap *subjective well-being* guru dalam konteks pendidikan. Namun, terdapat perbedaan dalam metode dan subjek penelitian. Taslim dan Dabi menggunakan pendekatan kuantitatif pada guru SLB dengan status honorer dan PNS di Ternate, sementara penelitian saya bersifat kualitatif dengan fokus pada guru pendamping khusus (GPK) di sekolah inklusi di Kota Kediri.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam enam bab yang masing-masing memiliki peran dalam menguraikan keseluruhan proses penelitian, dari latar belakang hingga kesimpulan.

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan konteks penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar perbandingan dan penguatan argumen dalam penelitian ini.

BAB II berisi landasan teori yang mendukung penelitian, dengan fokus pada konsep *subjective well-being* dalam konteks Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi. Dalam bab ini, dijelaskan berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan *subjective well-being*, faktor-faktor yang

²⁶ Viva Hadyasri Taslim dan Syam Ardhy Dabi Dabi, "Perbedaan *Subjective Well-Being* pada Guru Sekolah Luar Biasa Berstatus Honorer dan Pegawai Negeri Sipil di Ternate," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 2 (17 Juni 2024), <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.724>.

memengaruhinya, peran dan tugas guru pendamping khusus (GPK) dalam lingkungan pendidikan inklusif, serta definisi dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus (ABK).

BAB III membahas metodologi penelitian yang digunakan. Bagian ini mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta prosedur penelitian yang diterapkan. Metodologi yang dipilih akan dijelaskan secara rinci untuk memastikan keabsahan data.

BAB IV memaparkan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari proses penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan disajikan secara sistematis, baik dalam bentuk deskripsi, tabel, maupun grafik jika diperlukan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai hasil penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

BAB V berisi pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan temuan yang telah diperoleh dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini, akan dianalisis bagaimana hasil penelitian mencerminkan karakteristik *subjective well-being* pada guru pendamping khusus (GPK) serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, perbandingan antara temuan penelitian dengan teori yang telah ada juga akan dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

BAB VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian, sementara saran akan diarahkan pada pihak-pihak terkait, seperti guru pendamping khusus (GPK), sekolah, dan peneliti selanjutnya, guna memberikan rekomendasi yang dapat mendukung

peningkatan *subjective well-being* pada guru pendamping khusus (GPK) di sekolah inklusi.